MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MIS AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH

Malida

UIN Antasari Banjarmasin

malidalida09@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan pendidikan sering dianggap sebagai permasalahan yang besar dalam mendukung sekolah atau madrasah untuk menjadi sekolah yang lebih unggul. Perkembangan dunia pendidikan saat ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup serius untuk dipikirkan oleh pengelola pendidikan. Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang manajemen pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, yang meliputi: perencanaan penyusunan anggaran, proses pembukuan dan proses audit (pengawasan atau pelaporan). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yang terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Hasil temuan yang peneliti temukan dalam penelitian ini berupa strategi pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, manajemen pembiayaan madrasah menggunakan tiga strategi sebagai berikut: 1. Budgeting (Perencanaan Pembiayaan) 2. Accounting (Pembukuan Pembiayaan) 3. Auditing (Pengawasan dan Pelaporan).

Kata kunci: Manajemen, Pembiayaan Pendidikan, Madrasah

Abstract

Education financing is often considered a big problem in supporting schools or madrasahs to become superior schools. In the current development of the world of education, it can easily be said that the issue of financing is a serious enough problem for education managers to think about. The focus of the problem raised in this research is the management of education financing at MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, South Barito Regency, Central Kalimantan, which includes: budget planning, bookkeeping process and audit process (supervision or reporting). This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques are observation, documentation and interviews related to education financing management in Mis Ahlusunnah Wal Jama'ah, South Barito Regency, Central Kalimantan. The findings that researchers found in this research were education financing strategies. In Mis Ahlusunnah Wal Jama'ah, South Barito Regency, Central Kalimantan, madrasah financing management uses three strategies as follows: 1. Budgeting (Financing Planning) 2. Accounting (Financing Bookkeeping) 3. Auditing (Supervision and Reporting).

Keywords: Management, Education Financing, Madrasah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dirinya. Lester D. Crow menyatakan bahwa “*Education implies experience,*

insight, and adjustment on the part of the learner as he is stimulated toward growth and development".¹ Pendidikan menyiratkan sebuah pengalaman, wawasan, dan penyesuaian pada pihak dari pembelajar ketika ia distimulus ke arah pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu usaha dalam meningkatkan pikiran, budi pekerti, serta jasmani anak, untuk dapat meningkatkan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang sesuai dengan alam dan masyarakat.² Pentingnya peranan pendidikan, maka pendidikan dapat dilakukan dalam beberapa bagian, seperti melalui pendidikan formal ataupun non formal. Pendidikan formal sendiri merupakan lembaga pendidikan yang ditempuh melalui jalur institusi yang sudah ditentukan dan ditetapkan, serta diatur oleh sekelompok orang yang berwenang yang dalam hal ini pemerintah atau sebuah yayasan. Oleh karena itu, eksistensi lembaga pendidikan khususnya pada lembaga pendidikan islam seperti Madrasah Ibtidaiyah sendiri kini cukup menyebar di berbagai wilayah. Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan di Indonesia harus mengikuti UU No. 20/2003 tentang sisdiknas, PP 19/2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Madrasah Ibtidaiyah merupakan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Madrasah Ibtidaiyah memadukan pembinaan luas dengan ilmu-ilmu agama Islam pada jenjang pendidikan dasar yang berada di bawah arahan kementerian agama. Madrasah Ibtidaiyah menekankan pada penanaman mata pelajaran keagamaan dan praktik ibadah yang bertujuan untuk membangun karakter dan moralitas peserta didik dengan warna islam yang direfleksikan dalam cara berpikir, sikap dan praktik kehidupan sehari-hari. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di tempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kurikulum madrasah Ibtidaiyah sama dengan kurikulum sekolah dasar, hanya saja pada Madrasah Ibtidaiyah terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan Agama Islam. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan wadah yang benar-benar memenuhi elemen-elemen institusi yang tidak terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan lain.

Pendidikan Islam di Indonesia sering dihadapkan pada problematika. Pembiayaan pendidikan sering dianggap sebagai permasalahan yang besar dalam mendukung madrasah swasta untuk menjadi sekolah yang unggul. Perkembangan dunia pendidikan dewasa ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup serius untuk dipikirkan oleh pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah terkait dengan keuangan. maka firman Allah dalam al-quran surat At-Taubah ayat 41:

¹Lerter D. Crow, *Intoduction To Education*. (New York: American Book Company, 1960). h. 53.

²Rahmat Hidayat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019). h.24

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Adanya standar yang telah ditetapkan pemerintah, bertujuan agar pendidikan dapat menjadi sebuah wadah untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pendidikan merupakan kemampuan lembaga madrasah dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar secara optimal. Untuk itu pembiayaan pendidikan yang merupakan salah satu standar pendidikan yang harus diperhatikan. Standar pembiayaan pendidikan sendiri ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan penilaian pada lembaga pendidikan lewat program akreditasi.³ Maka dari itu, manajemen pembiayaan pendidikan sangat penting dalam menjalankan suatu program pendidikan.

Manajemen pembiayaan diartikan sebagai suatu usaha pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan oleh manajer dalam suatu lembaga.⁴ Manajemen pembiayaan menurut Nanang Fattah adalah salah satu pusat dalam menentukan jalannya untuk kegiatan dalam pendidikan.⁵ Sebagaimana menurut Ari Sandi Setiawan, dkk, kualitas praktik pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagian pembiayaan pendidikan. Karena pendidikan tidak lepas dari penggunaan dana atau pengeluaran dalam penyelenggaraan pendidikan, maka lembaga pendidikan harus mengutamakan pengelolaan biaya tersebut agar dapat dialokasikan sesuai dengan pendapatan.⁶ Artinya manajemen pembiayaan yang direncanakan dan kemudian dilaksanakan harus secara sengaja, sungguh-sungguh dan perlu kecermatan dalam memaksimalkan pembiayaan pendidikan agar tetap lebih baik dan berjalan sesuai rencana terutama dalam mencapai tujuan pendidikan. Mengingat pembiayaan dalam pendidikan menjadi hal yang sangat penting, maka pemerintah mengusahakan penyelenggaraan pendidikan yaitu pada ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.⁷ Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 tentang pendanaan pendidikan menyatakan bahwa pembiayaan

³Masditou. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu, *Jurnal ANSIRU PAI*, (Online), Vol.1, No.2 (2017).

⁴Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005). h. 267

⁵Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). h.23

⁶Ari Sandi Setiawan, Ismet Basuki, Erny Roesminingsih. “*Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.*” *Surabaya State University* 7, No. 3 (2019). h. 442

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Tentang Pendidikan... h. 9.

pendidikan adalah tanggungjawab bersama baik itu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagaimana kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan pendidikan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada dasarnya BOS ditetapkan bermaksud untuk membantu pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan.

Masalah keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa pada implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang menuntut sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepala sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing madrasah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan diperlukan keahlian dan kreativitas dari kepala sekolah secara mandiri dalam manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah. Manajemen pembiayaan dalam madrasah tentunya dilakukan dengan melalui perencanaan penganggaran hingga pengawasan pertanggung jawaban keuangan. Menurut Suryosubroto, terdapat 3 tujuan pengelolaan, yaitu a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan. b) Meningkatkan akuntabilitas transparansi keuangan. c) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran.⁸ Dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan bukan semata-mata hanya mengulik tentang sumber dananya, tapi juga tentang penggunaan dana baik dalam penyediaan sarana dan prasarana secara efisien.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dilihat bahwasanya setiap lembaga madrasah dituntut untuk dapat mengelola pembiayaan dengan efektif dan efisien guna mencukupi dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan kegiatan pendidikan. Lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah sendiri merupakan sarana penting dalam pembentukan manusia di masa depan dalam operasionalnya tidak lepas dari unsur pembiayaan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, maka biaya pendidikan perlu dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, langkah pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada setiap proses langkah dalam manajemen pembiayaan yang terutama diperhatikan adalah tahapan perencanaan, pembukuan dan pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan.

Lembaga madrasah Ibtidaiyah yang berstatus swasta seperti MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah merupakan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan berbasis nilai spiritual islam. Madrasah ini berada di pinggiran kota di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Madrasah ini tergolong madrasah yang memiliki fasilitas sarana prasarana yang cukup memadai dan maju dibanding madrasah lain yang sudah lama dibangun. Madrasah ini sama-sama mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah, seperti madrasah swasta lainnya yang

⁸Suryobroto. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). h. 86

berada di Barito Selatan. Sebagaimana kebijakan nasional pemberian dana BOS untuk semua lembaga pendidikan, maka sebagian madrasah tidak lagi diperolehkan untuk menarik biaya dari siswa. Hasil wawancara antara peneliti dengan kepala sekolah mengenai pembiayaan pendidikan, mereka menyatakan bahwasanya mereka sama seperti lembaga madrasah Ibtidaiyah lain yang berada di Kabupaten Barito selatan, sumber utama mereka adalah pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Setiap madrasah sama-sama mendapatkan bantuan BOS, namun tidak semua madrasah mampu mengoperasikan biaya pendidikan dengan baik. Sebagaimana dari observasi awal, peneliti melihat bahwa MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah Jannah merupakan salah satu madrasah yang memiliki pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bagus. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah. Sehingga madrasah tersebut dominan lebih diminati dan dapat mempertahankan mutu madrasah dan memberikan kenyamanan dalam menjalankan proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dibandingkan madrasah lain, khususnya madrasah yang berstatus swasta. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai suatu acuan atau referensi bagi lembaga pendidikan khususnya dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

1. Definisi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Kata manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui suatu proses dan dikelola sesuai dengan urutan dan fungsi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) dalam kegiatan anggota organisasi dan kegiatan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tertentu. Beberapa ahli memiliki beberapa definisi mengenai manajemen. Merry Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni mencapai tujuan melalui penerapan sikap, dan keterampilan tertentu.⁹ Sedangkan manajemen menurut Fridreck Taylor adalah *manajement the art of manajement is definet as knowing exactly what you want to do an then seing that do in the bestand cheapest way.*¹⁰ Nanang Fattah mengemukakan bahwa manajemen adalah proses merencana, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan semua aspek agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.¹¹ Sedangkan manajemen menurut Islam

⁹Wahjosomidji. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2001). h. 129.

¹⁰Mochtar Effendy. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: PT Bhatara Karya Aksa, 1986). h. 6

¹¹Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). h. 1

adalah aktivitas yang berlandaskan nilai-nilai keadilan yang merupakan perbuatan pimpinan yang tidak menyakiti bawahan.¹² Jadi manajemen merupakan kapasitas individu untuk mempersiapkan, memilih, dan melibatkan orang lain yang ditentukan untuk memiliki pilihan untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi dan teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan istilah pembiayaan berasal dari kata biaya yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lainnya) sesuatu, ongkos belanja, dan pengeluaran. Sedangkan istilah pembiayaan sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹³ Menurut Nanang Fattah, pembiayaan merupakan penjelasan jumlah uang yang dihasilkan dan dikeluarkan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti gaji guru, pengembangan profesi guru, pembelian peralatan dan buku pelajaran, perlengkapan kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan manajemen, pendidikan dan pengawasan atau pengembangan pendidikan, dan administrasi sekolah.¹⁴

Paparan di atas dapat kita simpulkan pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan pendapatan, bagaimana dana digunakan, dan bagaimana sumber daya didistribusikan untuk membiayai program kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan yang dapat membantu pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah rangkaian kegiatan mengelola dan mengatur keuangan lembaga pendidikan yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan lembaga pendidikan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkaitan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu penyusunan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), dan pemeriksaan (*controlling*).

2. Tujuan Manajemen Pembiayaan

Melalui kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan, kebutuhan pendanaan, pembiayaan kegiatan dan anggaran lembaga pendidikan dapat merencanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program lembaga pendidikan secara efektif dan efisien, sekaligus dipertanggungjawabkan untuk memberikan rasa puas pada pihak-pihak yang mendominasi uang untuk kegiatan lembaga pendidikan. Untuk itu tujuan manajemen pembiayaan adalah: a) Meningkatkan investigasi

¹²Kh. U. Seafullah. *Manajemen Pendidika Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). h. 49

¹³<https://kbbi.web.id/biaya>. Di Akses Pada 4 Agustus 2023 Pukul 19:47 WITA.

¹⁴Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2000). h.112

sumber dana lembaga pendidikan; b) Membangun kontrol yang tepat atas sumber daya keuangan lembaga pendidikan; 3) Meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan dana kelembagaan; 4) Membuat keuangan lembaga pendidikan lebih transparan dan akuntabel; 5) Mengelola dana yang telah tersedia untuk mendukung tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran dengan sebaik-baiknya; 6) Membangun sistem pengelolaan keuangan yang andal, mudah digunakan, dan aman serta bebas dari perilaku tidak terpuji; 7) Mengintensifkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembiayaan pendidikan.¹⁵

3. Prinsip Manajemen Keuangan Madrasah/Sekolah

Manajemen keuangan madrasah/sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip. Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

a) Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di lembaga sekolah/madrasah. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga madrasah/sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah (RAPBS). Bisa dilakukan dengan menempelkan di papan pengumuman di ruangan guru sehingga mudah bagi siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui beberapa jumlah uang yang diterima sekolah/madrasah dan dipergunakan untuk apa saja. Perolehan informasi juga menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah/madrasah.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah/madrasah

¹⁵Nanang Fattah. h. 6-7

membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepala orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah/madrasah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah/madrasah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayan yang cepat.

3) Efektivitas

Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness "characterized qualitative outcome"*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil kegiatan. *"Efficiency characterized quantitative outputs"*. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan pengeluaran. Atau antara daya dan hasil. Daya yang maksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya.¹⁶ Dalam penggunaan dana, dibutuhkan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi.

4. Tugas pengelola keuangan

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan, menganut asas pemisah tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendahara. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahkan fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dianjurkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban

¹⁶A. Rusdiana dan Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. (Bandung: ARSAD PRESS, 2013). h. 27-30

melakukan pengawasan ke dalamnya. Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi bendaharawan, juga dilimpahkan fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.¹⁷

5. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan keuangan secara garis besar mencakup 3 hal utama, yaitu : a. *Budgetting* (perencanaan anggaran); b. *Accounting* (pencatatan atau pembukuan); c. *Auditing* (pemeriksaan atau pengawasan). Untuk masing-masing 3 hal tersebut akan dibahas sebagai berikut:

a. *Budgetting* (Perencanaan penyusunan Anggaran)

Budgetting atau disebut juga dengan perencanaan penyusunan anggaran merupakan kegiatan atau proses yang dikenal dengan anggaran. Anggaran adalah aktivitas mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, mencapai tujuan, dengan analisis *cost effectiveness*, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, anggaran ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses kegiatan pendidikan, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari komite sekolah.¹⁸

Dalam rangka penyusunan keuangan yang tepat bagi lembaga pendidikan, setidaknya administrator dan manajer pendidikan perlu menguasai sedikitnya 6 (enam) sistem penganggaran keuangan. Pentingnya penguasaan enam sistem ini tentunya agar operasionalisasi di lembaga madrasah berjalan maksimal, dan juga dalam rangka meminimalisir tingkat ketidaksesuaian penggunaan dana baik yang sudah maupun belum teranggarkan. Proses penyusunan anggaran adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, Lipham mengemukakan tiga cara sudut pandang, yaitu 1) *comparative approach*, penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk anggaran setiap tahun, 2) *The Planning Programming Budgeting Evaluation System (PPBES)*, penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum. Pada pendekatan ini, analisis dana pelaksanaan serta penilaian PPBES didasarkan pada *zero-based budgeting*. 3) *Functional Approach*, penganggaran dalam bentuk gabungan antara PPBES dan *comparative approach*.¹⁹ Penyusunan anggaran pada pengelola keuangan harus memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumberkan dari orang tua murid, komite, masyarakat, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu, pengelola

¹⁷Riinawati. *Sistem Pengelolaan Kurikulum dan Keuangan* (Mataram: LAFADZ JAYA, 2020). h. 84-85

¹⁸Hadar Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). h. 110

¹⁹Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016). h. 159-160.

keuangan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Hemat sesuai dengan kebutuhan; (b) Terarah dan terkendali sesuai rencana; (c) Tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar kebutuhan kegiatan belajar mengajar.²⁰

Menurut Nanang Fattah prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: (a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran. (b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan uang, jasa dan barang. (c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan finansial. (d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. (e) Menyusun ulasan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak berwenang. (f) Melakukan revisi usulan. (g) Persetujuan revisi usulan anggaran. (h) Pengesahan anggaran.

Proses pengembangan RAPBS pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Pada tingkat kelompok kerja

Kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para wakil kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan kemudian dikasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurang, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

b) Pada tingkat kerja sama dengan komite madrasah

Kerja sama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS.

c) Sosialisasi dan legalitas

Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada semua pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada kanwil Departemen Agama untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan.²¹

²⁰Nur Komariah, "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan", Dalam *Jurnal Al-Afkar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri*, Vol. VI No. 1 April, 2018. h. 72-73.

²¹Masditou, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI*, Vol.1. No. 2. 2017. h. 135-136

b. *Accounting* (Pembukuan/akuntansi)

Kegiatan kedua dari manajemen keuangan adalah pembukuan, atau kegiatan-kegiatan pengurusan keuangan. Pengertian dari *accounting* atau pembukuan adalah kegiatan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan di Madrasah yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Pada praktiknya, akuntansi adalah bahasa yang digunakan untuk menciptakan hasil aktivitas ekonomi. Latihan-latihan ini termasuk mengubah aset yang ada menjadi tenaga kerja dan barang-barang yang tidak dapat digunakan, dengan cara ini pembukuan dikaitkan dengan perkiraan dan pengungkapan hasil dari latihan perubahan aset ini. Pengelola keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, termasuk bagaimana mengalokasikan dana untuk infrastruktur dan kebutuhan lainnya. Ini dapat dipecah menjadi kegiatan penerimaan dan penyaluran secara umum.²²

Secara umum, pembukuan didefinisikan sebagai pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan sekolah/madrasah baik secara manual ataupun menggunakan komputer kedalam buku-buku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pembukuan sebagai “proses pencatatan data dan informasi keuangan”. Karena pengertian ini masih merupakan pengertian umum, maka perlu dicari pengertian yang lebih spesifik. Untuk tingkat sekolah, Buku Panduan BOS 2014 memberikan definisi pembukuan sebagai “pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana oleh sekolah, di dalam buku kas umum dan buku pembantu”. Dari definisi tersebut ada beberapa hal penting yang harus dipahami untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan baik. Pembukuan juga harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang tepat. Pembukuan yang dilakukan secara baik dan benar akan memberikan manfaat bagi sekolah/madrasah, karena melalui pembukuan sekolah/madrasah memiliki data dan rincian yang berkaitan dengan setiap penerimaan atau pengeluaran, maupun dana yang masih tersedia. Pengurusan dalam pembukuan keuangan meliputi dua hal yaitu:

- 1) Pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, pengurusan ini disebut dengan kepengurusan ketatausahaan.
- 2) Pengurusan tindak lanjut dari kepengurusan pertama yakni, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah ke bendaharawan. Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh Negara diberikan tugas untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga sehingga dengan jabatan itu mereka

²²Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011). h. 118-119

mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan terhadap urusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²³

c. *Auditing* (Pemeriksaan Atau Pengawasan)

Langkah terakhir adalah *auditing*, bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas sekolah. *Auditing* adalah fungsi di dalam manajemen pendidikan yang harus dilakukan oleh setiap kepala sekolah/madrasah untuk mengukur kinerja bendaharawan sekolah. Untuk itu, *auditing* diartikan sebagai proses mengukur dan menilai tingkat efektifitas kerja personil serta pada tingkat efisiensi penggunaan dana sekolah dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan lembaga pendidikan. *Auditing* bermanfaat pula untuk menemukan masalah-masalah keuangan sekolah, serta hasil *auditing* dapat digunakan untuk meningkatkan perasaan bertanggung jawab bagi bendahara sekolah.²⁴ Pertanggung jawaban merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak. Untuk melaksanakan audit diperlukan informasi yang dapat diverifikasi. Ada beberapa jenis pemeriksaan audit yaitu:

a) Pemeriksaan laporan pembiayaan

Bertujuan menentukan apakah laporan pembiayaan secara keseluruhan merupakan informasi yang sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

b) Pemeriksaan operasional

Merupakan penelaahan atas bagian mana pun dari prosedur dan metode operasi dari suatu organisasi untuk menilai efisiensi. Dalam pemeriksaan operasional, tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi tetapi juga meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi.²⁵ Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ke empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi

²³Arikonto, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008). h. 318

²⁴Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah* (Bandung: Pustaka Educa, 2010). h. 169

²⁵Arwildayanto, dkk. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Jabar: Widya Padjadjaran, 2017), h. 25

laporan keuangan di tahun sebelumnya dengan laporan keuangan saat ini, dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

B. Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah secara harfiah berasal dari Bahasa Arab yang artinya sama atau setara dengan kata Indonesia "sekolah".²⁶ Secara harfiah madrasah bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar secara formal. Namun demikian Karel Steenbrink membedakan madrasah dan sekolah karena keduanya mempunyai ciri khas yang berbeda. Madrasah memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. Madrasah sangat menonjol nilai religiusitas masyarakatnya. Sementara sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.²⁷

Madrasah dalam bentuk yang kita kenal saat ini memiliki konotasi spesifik, di mana anak memperoleh pembelajaran agama. Madrasah inilah yang tadinya disebut pendidikan keagamaan dalam bentuk belajar mengaji Al-Qur'an, kemudian ditambah dengan pelajaran ibadah praktis, terus kepada pengajaran tauhid, hadis, tafsir, tarikh Islam dan Bahasa Arab. Kemudian masuk pula pelajaran umum dan keterampilan.²⁸ Dari segi jenjang pendidikan, mulanya madrasah identik dengan belajar mengaji Qur'an, jenjang pengajian tingkat dasar dan pengajian kitab tingkat lanjut, kemudian berubah ke jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.²⁹

Madrasah ibtidaiyah atau disingkat "MI" adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Madrasah setara dengan Sekolah Dasar yang menjadikan pembeda kedua jenjang tersebut salah satunya adalah pada Sekolah Dasar ilmu agama yang disampaikan hanya ada di PAI, sedangkan di Madrasah terdapat beberapa cabang ilmu agama seperti Fiqih, Al-Qur'an Hadist, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam, dimana pembelajarannya yang berpusat pada keagamaan.

Kontribusi penting dengan berdirinya Madrasah sebagai lembaga yang ikut serta memiliki tujuan pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan Pendidikan Indonesia. Apabila dikaitkan dengan kurikulum yang berlangsung yakni K13 menjadikan lembaga yang layak di perhitungkan dalam mencetak generasi bangsa yang memiliki karakter yang baik

²⁶Depag RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, Paradigma Baru* (Jakarta: Dirjen Agama Islam, 2005). h. 62

²⁷Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1991). h. 46

²⁸Maksum Mukhtar, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001). h. 66.

²⁹Maksum Mukhtar, h. 47

dimasa depan dengan salah satunya melalui pembelajaran yang berpusat pada keagamaan yang pasti berkaitan dengan moral.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif*. Di sini peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, dengan bertujuan untuk menggali informasi tentang manajemen pembiayaan pendidikan MIS Ahlu Sunna Wal Jama'ah Barito Selatan Kalimantan Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti akan menginterpretasikan antara hasil temuan yang telah dirumuskan dalam bentuk tema kajian pustaka yang relevan. Selanjutnya dapat dijelaskan yang mendasari tema penelitian di sini adalah fokus tentang manajemen pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jam'ah. Hasil pembahasan disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu:

A. Proses Penyusunan Anggaran Pembiayaan Pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jam'ah

Manajemen pembiayaan yang diterapkan di MIS Ahlusunnah Wal Jam'ah dapat dikatakan baik terbukti dengan adanya koordinasi kepala sekolah, guru bendahara serta melibatkan wali murid dalam mengambil keputusan terkait program-program yang akan dijalankan oleh Madrasah dalam angka waktu satu tahun ke depan. Dari program-program tersebut menentukan anggaran untuk membiayai program-program yang telah direncanakan.

Adapun manajemen pembiayaan pendidikan yang terdapat di Madrasah melingkupi perencanaan penyusunan anggaran pembiayaan, pembukuan anggaran pembiayaan, pemeriksaan anggaran pembiayaan sekolah. Manajemen pembiayaan berarti bagaimana supaya pembiayaan di sekolah bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan strategi yang tepat, dan tentunya memiliki kerja sama yang baik.

Berikut manajemen pembiayaan pendidikan yang digunakan di Madrasah. Proses penyusunan anggaran yang terdapat di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah dituangkan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diadakan pada setiap awal tahun pembelajaran. RAPBS disusun dengan melibatkan komponen-komponen penting seperti kepala sekolah, guru bendahara, tenaga pendidik dan kependidikan, dan sebagian dari wali murid atau masyarakat. Dalam RAPBS ini terdiri dari dua anggaran yaitu anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran. Dari rencana kegiatan tersebut dapat diketahui kebutuhan masing-masing program, baik kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan bahan ajar dan yang lain. Kemudian setelah RAPBS sudah selesai selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang di susun oleh bendahara BOS atau bendahara Sekolah. Di samping itu, selain membuat perencanaan

untuk satu tahun ke depan pada rapat tersebut dilakukan evaluasi guna mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang dialami Madrasah selama satu tahun sebelumnya, supaya menemukan solusi yang tepat untuk kendala yang dialami pada tahun sebelumnya. Hasil rapat ini sangat berguna untuk memberikan pendapat, solusi, serta masukan agar dapat digunakan untuk perbaikan ditahun yang akan datang.

Perencanaan dalam manajemen pembiayaan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dan untuk setiap komponen. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Lipham mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost affectivienes*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
2. Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.
3. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelajaran dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan pertanggungjawaban pembiayaan.
4. Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai program belajar mengajar, menilai bagaimana mencapai sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.³⁰

B. Proses Pembukuan Pembiayaan Pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah

Mengenai proses pembukuan pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah setiap transaksi dibukukan menurut kelompok/jenis akunya, yaitu buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Pada dasarnya proses pengisiannya yaitu dengan mengenali jenis transaksinya, apakah penerimaan atau pengeluaran, apakah sumber dananya, dalam rangka program sekolah atau program nasional. pada akhir bulan harus ditutup dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah.

Sebagaimana di atas, hasil pada temuan penelitian bahwa proses pembukuan yang dilakukan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, dilakukan dengan baik dan sangat hati-hati, setiap

³⁰Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Hlm. 162-163

pembukuan menggunakan kelompok pembukuan sebagai berikut: buku kas umum, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak, dengan mengelompokkan pembukuan sesuai dengan kelompoknya akan mempermudah setiap bendahara dalam pertanggung jawabannya dan dengan pembukuan tersebut sekolah juga bisa mengevaluasi kebutuhan apa saja yang masih belum terlaksana pada tahun ini, dan akan di anggarkan untuk anggaran tahun selanjutnya.

Pengelolaan dalam pembukuan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, kepala sekolah serta semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Merancang satu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. 3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. 4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing lembaga. 6. Menuangkan rinci-rinci tersebut kedalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap manusia. 7. Pengesahan dokumen RAPBS tersebut oleh instansi yang berwenang. Sebagaimana wawancara dengan bendahara sekolah bahwa:

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah termasuk sarana prasarana sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk sarana prasarana sekolah, pembiayaan sekolah, dan untuk standar yang lain. Penyusunan RAPBS tersebut melibatkan kepala sekolah dan guru bendahara. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal dengan dukungan anggaran yang memadai.

Berdasarkan hasil pernyataan dari kepala sekolah dan bendahara sekolah, bahwa pembukuan yang ada di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah bisa dikatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Setiap bendahara memiliki pembukuan dan sesuai dengan anggaran yang diperoleh.

C. Proses Audit dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah

Proses audit pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah sebelum melakukan pelaporan pembiayaan harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah terlebih dahulu, baik itu untuk pelaporan *online* maupun *offline*, dan diberlakukan bagi semua bendahara sekolah. Pemeriksaan pembiayaan pendidikan di sekolah dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali di Madrasah sesuai dengan anggaran yang diperoleh.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada temuan penelitian bahwa pemeriksaan pembiayaan atau laporan pembiayaan itu dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemeran penting di sekolah, baik itu pembiayaan yang anggarannya dari dalam maupun anggaran dari pemerintah. Proses audit ini bukan hanya pembiayaan yang bersifat global atau seluruh anggaran sekolah, akan tetapi pemeriksaan pembiayaan ini dilakukan bagi setiap anggaran yang masuk, misalnya anggaran dari BOS dari anggaran tersebut kepala sekolah melakukan audit dari laporan bendahara karena setiap bendahara nantinya melaporkan pertanggung jawabannya kepada pemerintah atau kepada yang memberi bantuan.

Proses audit adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Ada beberapa jenis pemeriksaan (audit) keuangan.

1. pemeriksaan laporan pembiayaan, bertujuan menentukan apakah laporan pembiayaan secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya adalah prinsip akuntabilitas yang berlaku umum seringkali dilakukan audit pembiayaan yang disusun berdasarkan pada basis kas akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan lembaga yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan operasional, merupakan penelaahan atas bagian mana pun dari prosedur dan metode operasi suatu lembaga atau organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya pemeriksaan operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalanya operasi lembaga. Dalam pemeriksaan operasional, tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, pemanfaatan komputer, metode produksi, pemasaran dan bidang-bidang lain sesuai keahlian auditor.
3. Pemeriksaan (*auditing*) ketaatan, bertujuan mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Suatu pemeriksaan ketaatan pada lembaga pendidikan, dapat termasuk menentukan apakah para pelaksana akuntansi pendidikan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga, contohnya peninjauan standar biaya umum, pemeriksaan perjanjian dengan pihak lain.³¹

³¹Arwildayanto, dkk. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Jabar: Widya Padjadjaran, 2017) Hlm. 30

Pertanggung jawaban (*auditing*) menurut Cormark *auditing* merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak.

Lebih lanjut sesuai dengan hasil penelitian, pada waktu tertentu kepala sekolah melakukan pemeriksaan kepada bendahara dan membandingkan antara pelaksanaan pembiayaan dengan perencanaan pembiayaan, apabila sudah sesuai maka laporan pertanggungjawaban bisa dikirim atau dilaporkan kepada masing-masing yang memberikan anggaran kepada sekolah, dan apabila masih ada yang belum sesuai harus melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum laporan pertanggungjawaban dikirimkan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tahapan perencanaan diawali dengan pemilihan strategi yang tepat, dengan proses perencanaan yang matang terhadap segala yang berkaitan dengan pembiayaan yang memungkinkan menjadi energi positif bagi keefektifan pendidikan.

KESIMPULAN

1. Perencanaan penyusunan anggaran pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah yaitu dilakukan dengan mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
2. Proses pembukuan pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah yaitu buku kas, buku bantuan bank dan buku bantuan pajak.
3. Proses audit manajemen pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah yaitu dilakukan pada setiap enam bulan sekali dan satu tahun sekali.

SARAN

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian, maka peneliti merekomendasikan kepada Yayasan Ahlusunnah Wal Jama'ah dalam pemenuhan dana untuk pembangunan MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah. Pembangunan diharapkan untuk benar-benar memperhatikan dana pembangunan ruang belajar, laboratorium dan beberapa kekurangan saran dan prasarana pendidikan. Dengan begitu peneliti berharap agar yayasan, komite maupun kepala sekolah MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah. Pembangunan menggali sumber-sumber ekonomi potensial yang belum diidentifikasi, seperti membangun jaringan kerja sama yang lebih luas lagi dengan dunia usaha dan dunia industri.

DAFTAR PUSTAKA

Arwildayanto, dkk. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Jabar: Widya Padjadjaran, 2017.

Malida: Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah

Crow, Lerter D. *Intoduction To Education*. New York: American Book Company, 1960.

Depag RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, Paradigma Baru*. Jakarta: Dirjen Agama Islam, 2005.

Effendy, Mochtar. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: PT Bhatara Karya Aksa, 1986.

Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Hidayat, Rahmat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019.

Mukhtar, Maksum. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001.

Masditou. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu*. *Jurnal ANSIRU PAI*, (Online), Vol.1, No.2. 2017.

Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016.

Nawawi, Hadar. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Riinawati. *Sistem Pengelolaan Kurikulum dan Keuangan*. Mataram: LAFADZ JAYA, 2020.

Syafaruddin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Sugito, AT. *Pergeseran Pradigmatik Manajemen Pendidikan*. Semarang: Widya Karya, 2013.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1991.

Setiawan, Ari Sandi Ismet Basuki, Erny Roesminingsih. "Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya." *Surabaya State University* 7, No. 3. 2019.

Seafullah. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Suryobroto. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Tampolon, Manahan. *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Wahjosomidji. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2001.